

Research Article

The Role of School Personnel in Implementing Guidance and Counseling in the Era of Globalization

Anissa

Universitas Negeri Padang

E-mail: anissa.spd03@gmail.com

Firman

Universitas Negeri Padang

E-mail: firman@fip.unp.ac.id

Neviyarni S

Universitas Negeri Padang

E-mail: neviyarni@konselor.org

Copyright © 2024 by Authors, Published by Quality, Journal of Education, Arabic and Islamic Studies.

Received : May 25, 2024

Revised : June 14, 2024

Accepted : June 30, 2024

Available online : July 21, 2024

How to Cite: Anissa, Firman, & Neviyarni S. (2024). The Role of School Personnel in Implementing Guidance and Counseling in the Era of Globalization. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 2(3), 198–207. <https://doi.org/10.58355/qwt.v2i3.84>

Abstract

The global era as a new paradigm implies two main things, namely Internationalization Competition and Internationalization Links. What is needed to answer this global challenge lies in the quality of human resources, where individuals are required to think globally by acting and thinking quickly. What is no less important is the mentality of competing internationally by changing the role from spectator to player. Carrying out guidance and counseling management in accordance with developments in the era of globalization, the quality of human resources or the competency of counselors needs to be increased, sensitive to opportunities and responsive to global challenges and the need for cooperation between counselors and school personnel. The successful implementation of guidance and counseling management in schools cannot be separated from the cooperation of all school personnel. The success of counseling can support the achievement of educational goals for students at school. This research method is literature study. Data collection is carried out through a number of data libraries, recording and managing research materials. Based on the results of the research conducted, it shows that the collaboration carried out by the principal, homeroom teacher and class teacher in implementing guidance and counseling management at school has not been optimal. One of them can be seen from the cooperation of school personnel in providing or receiving input and suggestions, exchanging ideas or discussing openly.

Keywords: School Personnel, Guidance and Counselling, Globalization.

Peran Personil Sekolah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling di Era Globalisasi

Abstrak

Era global sebagai suatu paradigma baru di dalamnya tersirat dua hal pokok yaitu Internationalization Competitions and Internationalizations Link. Hal yang diperlukan untuk menjawab tantangan global ini terletak pada kualitas sumber daya manusia, di mana individu dituntut berpikir global dengan bertindak dan berpikir cepat. Hal yang tidak kalah penting adalah mental bersaing dalam dunia internasional dengan merubah peran dari penonton menjadi pemain. Menyelenggarakan manajemen bimbingan dan konseling sesuai dengan perkembangan era globalisasi, kualitas sumber daya manusia, atau kompetensi konselor, perlu ditingkatkan peka terhadap peluang dan tanggap terhadap tantangan global dan perlunya kerjasama antara konselor dengan personil sekolah. Keberhasilan pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah tidak terlepas dari kerjasama seluruh personil sekolah. Keberhasilan konseling dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan bagi peserta didik disekolah. Metode penelitian ini adalah studi literature. Pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah data pustaka, mencatat dan mengelola bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan kepala sekolah, wali kelas, dan guru kelas dalam pelaksanaan manajemen bimbingan konseling disekolah belum berjalan optimal. Salah satunya dapat dilihat kerjasama personil sekolah dalam memberikan atau menerima masukan dan saran, saling terbuka bertukar pikiran atau berdiskusi.

Kata Kunci: Personil Sekolah, Bimbingan Dan Konseling, Globalisasi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, pendidikan dituntut untuk menyiapkan manusia yang mampu berkompetisi dan mampu menyiapkan peserta didik untuk menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa, terutama dari Barat (Winata et al., 2022). Akulturasi budaya langsung atau tidak langsung akan terjadi dengan sangat cepat (Wicaksono, 2012) baik secara positif ataupun negatif yang kemudian mengakibatkan munculnya kesadaran masyarakat pada tingkat global bahwa dunia merupakan satu kesatuan (Firman, 2018). Era global sebagai suatu paradigma baru di dalamnya tersirat dua hal pokok yaitu Internationalization Competitions and Internationalizations Link (Arifudin, 2021). Hal yang diperlukan untuk menjawab tantangan global ini terletak pada kualitas sumber daya manusia, di mana individu dituntut berpikir global dengan bertindak dan berpikir cepat (Nursalim, 2020). Hal yang tidak kalah penting adalah mental bersaing dalam dunia internasional dengan merubah peran dari penonton menjadi pemain.

Nilai-nilai baru dari globalisasi perlu diterjemahkan oleh berbagai pihak termasuk konselor. Sebagai bangsa timur pendidikan karakter adalah hal yang utama (Suriadi et al., 2021; Isriwal et al., 2019) di samping keterbukaan terhadap globalisasi yang membawa kemajuan bidang teknologi, informasi, komunikasi (Kusumawati, 2020). Bangsa Indonesia harus memiliki batasan dalam hal ini yaitu karakter dan gaya hidup kebarat-baratan yang bebas, jika kita tidak memikirkan hal ini maka bangsa kita hanya sebagai korban globalisasi atau kemajuan dan persaingan bangsa lain, namun tidak pernah menikmati kemajuan itu. Intelektual dan keterampilan akan berkembang dengan mudah jika pengembangan karakter (akhlak dan moral) bangsa berhasil.

Konselor dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan peradaban dan generasi yang menjadi sasaran pemberian layanan, sehingga Bimbingan dan Konseling harus terus berkembang mengikuti kemajuan zaman (Neviyarni, 2023). Ketercapaian pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bergantung bagaimana manajemen pengelolannya sebagai seni dan ilmu dalam pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini konselor hendaknya berani dan membiasakan diri untuk lebih kreatif dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling (Amalianita et al., 2021; Triyono et al., 2019) yang berorientasi pada paradigma baru untuk menyesuaikan dengan kemajuan global.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjadi acuan baru pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling mulai dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading* dan *controlling* (Zamroni & Rahardjo, 2015). Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memiliki strategi pembelajaran yang baik dan pelaksanaan yang baik juga. Manajemen yang di kelola dan dilaksanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh guru pembimbing, guru yang bekerja dengan memiliki manajemen yang baik adalah guru pembimbing yang memiliki program dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh siswa sekolah.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, tenaga administrasi. Kerjasama personil sekolah harus terpadu dan terintegrasi dengan program sekolah secara keseluruhan agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling efektif (Sutoyo & Supriyanto, 2015). Agar layanan bimbingan dan konseling dapat optimal, maka penyusunan program harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Tanggung jawab utama kegiatan bimbingan dan konseling adalah guru BK, namun guru BK mesti didukung organisasi sekolah ataupun personil sekolah lainnya.

Setyowati (2009) menyatakan seluruh personil sekolah terlibat terhadap penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, tidak hanya peran guru BK saja. Kerjasama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi; kepala sekolah, walikelas, guru mata pelajaran, dan tenaga administrasi. Melakukan kolaborasi dalam arah yang sama, yaitu pelaksanaan konseling dan tujuan konseling disekolah. Peran berbagai pihak menunjang keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling (Rahman, 2015). Tanggung jawab utama, pelaksanaan bimbingan dan konseling ialah guru BK, akan tetapi juga memerlukan kepala sekolah, dan guru kelas, serta walikelas untuk memudahkan penyelenggaraannya. guru BK bertugas melakukan pelayanan bimbingan dan konseling membimbing bagi siswa agar dapat optimal dalam belajar.

Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah sangat tergantung pada kolaborasi dan bantuan dari semua pihak yang ada di sekolah, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan terutama adalah kepala sekolah selaku pimpinan dan manajer sekolah. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah (Pardjono, 2017).

Namun realita di lapangan banyak permasalahan yang terjadi terkait peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Menurut Neviyarni.S, 2023 permasalahan yang berhubungan dengan kepala sekolah dalam pelayanan BK, diantaranya: 1) kepala sekolah tidak memahami kinerja guru BK/konselor, 2) terjadinya miskonsepsi kepala sekolah terhadap guru BK/konselor karena tidak dianggap penting dan bisa digantikan oleh guru mata pelajaran, 3) Kurangnya hubungan dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru BK/konselor. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Luddin (2013) yang menemukan bahwa kinerja kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling masih belum sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan (Yohanes, 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Boyland, Lori, 2018) menemukan bahwa banyak konselor sekolah diberikan tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi konselor sekolah, karena kepala sekolah kurang memahami tugas pokok dan fungsi konselor sekolah secara tepat. Tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada para konselortersebut adalah: (1) menjadi petugas disiplin peserta didik; (2) membantu tugas administrasi kepala sekolah, (3) melakukan administrasi tes seperti menginput data, dan(4) mengawasi peserta didik makan siang pada jam istirahat.

Berdasarkan berbagai persoalan diatas, penulis tertarik meneliti tentang peran personil sekolah dalam pelaksanaan manajemen binbingan dan konseling.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan studi literature yaitu pengumpulan informasi melalui data yang menggambarkan fenomena- fenomena yang berkaitan dengan peran personil sekolah yaitu kepala sekolah, wali kelas, beserta petugas adminstrasi dalam pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling disekolah. Menurut Warsiah (2009) serangkaian kegiatan yang berkenanaan dengan mengumpulkan sejumlah data pustaka, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dari berbagai sumber referensi untuk masalah yang ingin dipecahkan (Zed, 2018). Teknik ini dilakukan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian Personil manajemen bimbingan dan konseling terdiri dari semua unsur yang terlibat dalam struktur organisasi manajemen bimbingan dan konseling dengan koordinator pengawas khusus sebagai pelaksana utama. Personil manajemen bimbingan dan konseling disekolah harus bekerja sama untuk membantu berjalanya manajemen bimbingan dan konseling dengan efektif dan efesien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Personil Sekolah

Personil sekolah memiliki tanggung jawab dan tugas secara keseluruhan

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Selain itu, rasio antara seorang Guru BK dan jumlah peserta didik yang ditetapkan sebagai tanggung jawab, tugas dan wewenang pelayanan bimbingan dan konseling. Berhubungan dengan jenis dan jenjang pendidikan serta satuan pendidikan, terqualifikasi dan jumlah personil sekolah yang terdapat pada satuan pendidikan untuk dapat berkerjasama mempermudah pelayanan bimbingan dan konseling disekolah. Pada satuan pendidikan tanggung jawab dan tugas disesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan tetapi juga menghindari tuntutan akan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.

Wibowo (2020) menyatakan bahwa dua hal yang dapat dicapai dengan bekerja sama dengan personil sekolah, yaitu (1) membangun hubungan dapat dicapai melalui konsultasi dengan guru mata pelajaran, menyelenggarakan program kolaborasi dengan orang tua, personil sekolah dan bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling, (2) melaksanakan kerjasama dengan personil sekolah menjadi sarana pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui keikutsertaan dalam perkumpulan profesi, seminar dan program pelatihan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling.

Adapun tugas dan tanggung jawab personil sekolah sebagai berikut: 1. Peran konselor Peran konselor meliputi: (a) memahami karakteristik peserta didik, terutama yang mempengaruhinya, (b) menguasai konsep bimbingan dan konseling, mensosialisasi program BK, (d) menyusun perencanaan terhadap layanan konseling, (e) melakukan tindak lanjut hasil asesmen, (f) melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya, (g) menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling, (h) bertanggung jawab atas tugas dan kegiatan dihadapan kepala sekolah (Edli & Mudjiran, 2015). Konselor tidak hanya fokus memberikan layanan pada siswa yang bermasalah saja, namun juga melakukan evaluasi layanan yang diselenggarakan. 2. Kepala sekolah peran atau tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepala sekolah dalam bidang bimbingan adalah sebagai berikut: (1) membuat kebijakan dan strategi bimbingan dan konseling yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, (2) menyelenggarakan program bimbingan dan konseling yang terintegrasi dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik, (3) memfasilitasi kegiatan bimbingan dan konseling seperti tes psikologi, konseling individu dan kelompok, serta pelatihan keterampilan sosial dan emosional, (4) mengidentifikasi masalah yang dihadapi peserta didik dan memberikan solusi yang tepat melalui bimbingan dan konseling, (5) menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling yang efektif, (6) memastikan bahwa program bimbingan dan konseling yang diselenggarakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat bagi peserta didik, (6) mengembangkan dan memelihara budaya sekolah yang mendukung pengembangan diri peserta didik secara optimal (Dewa Ketut Sukardi, 2008).

Pendapat lain juga mengemukakan peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, diantaranya: (1) memimpin dan mengarahkan program bimbingan dan konseling kepala sekolah harus memimpin dan mengarahkan program BK di sekolah, (2) menyusun kebijakan BK di sekolah

kepala sekolah harus menyusun kebijakan BK di sekolah, (3) mengkoordinasikan pelaksanaan program BK kepala sekolah harus mengkoordinasikan pelaksanaan program BK di sekolah, (4) menyediakan sumber daya untuk program BK kepala sekolah harus menyediakan sumber daya untuk program BK di sekolah, (5) memberikan dukungan pada guru BK dan konselor kepala sekolah harus memberikan dukungan pada guru BK dan konselor di sekolah, (6) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BK kepala sekolah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BK, (7) menjalin hubungan dengan pihak luar kepala sekolah harus menjalin hubungan dengan pihak luar, seperti konselor di luar sekolah, psikolog, dan institusi terkait lainnya (Prayitno, 2005).

Pendapat lain juga mengemukakan secara lebih terperinci peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai berikut: (1) memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling, (2) menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun jumlahnya menurut keperluannya, (3) ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya, (4) mendelegasikan tanggung jawab kepada "guidance specialist" atau konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling, (5) memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid atau dalam bulletinbulletin bimbingan dan konseling, (6) Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling, (7) menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, (8) memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif(dalam hal ini berarti kepala sekolah hendaknya menyadari bahwa bimbingan dan konseling terjadi dalam lingkungan secara global, termasuk hubungan antara staf dan suasana dalam kelas), (9) memberikan penjelasan kepada semua staf tentang program bimbingan dan konseling dan penyelenggaraan "in-service education" bagi seluruh staf sekolah, (10) memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalaman-pengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal, kelompok maupun individual, dan (11) Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku peserta didik, namun bukan sebagai penegak disiplin (Dinmeyer dan Caldwell (Kusmintardjo 1992).

Pendapat lain juga mengatakan, peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bidang pembinaan dan konsultasi di sekolah, sebagai berikut: (1) membina dan mengembangkan potensi guru dan staf pendidik di sekolah agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik, (2) menyediakan bimbingan dan konseling bagi peserta didik untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, akademik, dan sosial-emosional, (3) menyediakan bimbingan dan konseling bagi orang tua peserta didik untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah anak-anak mereka, (4) Mengkoordinasikan dan

memantau program pembinaan dan konsultasi di sekolah, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program tersebut, (5) menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi program pembinaan dan konsultasi di sekolah (Suherman, 2007).

Disisi lain tugas dari pihak kepala sekolah dalam pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling adalah: (1). Mengawasi seluruh kegiatan yang termasuk dalam bimbingan konseling baik dari pelayanan, pelatihan maupun pengajaran yang dilakukan oleh guru BK, (2) Memberikan dan melengkapi sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh guru BK dalam menunjang tugasnya, (3) Memberikan kemudahan yang dapat membantu guru BK dalam menjalankan tugasnya, (4) Melakukan penilaian terhadap pelayanan bimbingan dan konseling terhadap guru BK, (5) Memilih seorang personil yang dapat bertanggung jawab di dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sesuai dari kesepakatan bersama guru-guru lain, (6) Memberikan surat tugas yang diberikan kepala sekolah kepada guru BK sebagai suatu acuan dalam tercapainya layanan bimbingan dan konseling di sekolah, (7) Memberikan surat pernyataan kepada guru BK dalam menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai acuan angka kredit bagi Guru BK, dari surat tersebut harus dilengkapi bukti yang terlihat/bukti fisik dari pelaksanaan tugas, (8) menjalin kerja sama kepada instansi lain yang terkait dalam proses layanan bimbingan dan konseling, (9) Memberikan layanan bimbingan dan konseling minimal 40 peserta didik, bagi kepala sekolah yang berlatang belakang pendidikan bimbingan dan konseling (Nurihsan (Satriyawan, dkk 2019).

Manajemen Bimbingan Dan Konseling

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjadi acuan baru pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling mulai dari planning, organizing, staffing, leading dan controlling (Zamroni & Rahardjo, 2015). Manajemen bimbingan dan konseling berbasis permendikbud nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu seorang konselor yang lulus dengan mengambil gelar profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling guru bimbingan dan konseling adalah tamatan S1 BK sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dapat melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling adalah seorang konselor atau yang memiliki tamatan S1 BK.

Zamroni & Rahardjo (2015) prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling meliputi: planning, organizing, staffing, leading & controlling. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis merupakan perwujudan dan penghimpunan pelayanan bimbingan dan konseling yang merupakan indikator kerja konselor.

Selanjutnya dengan manajemen bimbingan dan konseling yang sistematis dan terarah yang baik pada gilirannya akan memberikan paduan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sekaligus menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja secara insidental dan kuratif saja.

Sehubungan dengan konsep manajemen maka implementasi manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu manifestasi suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana merencanakan suatu aktivitas bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan, mengawasi bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dan menilai kegiatan bimbingan dan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling sekolah yang kaitannya dengan proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, memimpin dan pengawasan dapat terlaksana.

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata management (bahasa Inggris). Kata management berasal dari kata manage atau managiare, yang berarti melatih kuda dalam melangkahakan kakinya atau bisa juga berarti mengatur. Secara terminology manajemen berarti kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan (dalam Ali Imron:2013).

Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Manajemen sebagai suatu proses,
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen,
3. Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*Science*)

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama itu, dikemukakan tiga buah definisi. Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, Hilman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (*Art*) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.

Menurut Terry dan Rue (1992), manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang. Sedangkan Nanang Fattah (2008) menyatakan bahwa manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena

menejemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi menejer, danpara profesioanl dituntut oleh kode etik.

Manajemen diartikan sebagai upaya pengaturan sesuatu untuk mencapai tujuan melalui fungsi manajemen, yakni fungsi planning, organizing, actuating, controlling, dan melalui adminstrasi, yakni men, method, money, material, machine, and market ini merupakan defensisi secara luas. Berdasarkan pengertian diatas maka manajemen bimbingan konseling dapat diartikan sebagai upaya pengaturan untuk mencapai tujuan dari bk tersebut melalui fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, pengawasan, dan melalui administrasi yaitu konselor, metode, sumber dana, materi, perlengkapan dan peralatan.

KESIMPULAN

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, kerjasama personil sekolah Guru BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, wali kelas, tata usaha, komite sekolah, guru topik, guru praktik berperan penting dan berpengaruh signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling disekolah di era globalisasi. Pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling terkadang dilakukan sepihak tanpa adanya dukungan dari personil sekolah sehingga pelaksanaannya tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, D. ., Ibnudin, I., Rufaedah, E. A. ., & Himmawan, D. (2023). Bimbingan dan Konseling Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 3. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 33-40. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.33>
- Dewa Ketut Sukardi. 2008. *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didik Himmawan, Syaefulloh, Sofyan Sauri, & Azi Khoirurrahman. (2023). PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 20-30. <https://doi.org/10.58355/manajia.viii.3>
- Dwi Putranti, dkk. 2020. "Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Bimbingan." *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 3(2).
- Evanirosa, Dkk. 2022. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sain Indonesia.
- Firman. 2018. Peningkatan Profesionalisasi Melalui Pertukaran Guru. *Jurnal Academia*, 10(10).
- Lika Widiawati, Firman, Netrawati, & Mohd Nazri Abdul Rahman. (2024). Dynamics of Career Choice in High School: The Role of Personal Interests and Family Socio-Economic Status. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(2), 72-78. <https://doi.org/10.58355/psy.v2i2.22>
- Melva Syahrial, Neviyarni S, & Netrawati. (2023). Generating Hope in Group Counseling Through the Meaning of Life in Middle School Adolescents. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(2), 79-87. <https://doi.org/10.58355/psy.v2i2.25>

- Neviyarni. S. 2023. *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (Konsep, Masalah Dan Solusi)*. Jakarta: Kencana.
- Prayitno. 2005. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno & Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. 2018. *Konseling Profesional Yang Berhasil*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rahmadani, R., Neviyarni, N., & Firman, F. 2021. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 2973- 2977.
- Reva Pancarani, Didik Himmawan, Shefilla Agustiana, & Chandra Novan. (2024). The Nature of Humans as Social Creatures in the Qur'an. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 48-61. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i2.25>
- Sari, A. K., Neviyarni, S., & Syukur, Y. 2021. Urgensi kerjasama personil bimbingan konseling di sekolah. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 30-39.
- Sukardi, D. K. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Sukatma, Peranan Personil Sekolah Dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMKN 1 Manado. *Jurnal Ta'dib*, Volume 15, No. 1 (Juni 2012).
- Syifa Nur Fadilah, and Didik Himmawan. 2023. "Desain Bimbingan Belajar Yang Efektif Untuk Kemandirian Belajar (Studi Di MTs An-Nur Kota Cirebon Dan SMP Muhammadiyah Cirebon)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (2):960-67. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.552.
- Undang-Undang. 2003. *No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Yohanes, Yohanes. 2021. "Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Bimbingan Dan Konseling Untuk Meningkatkan Kinerja Konselor Sekolah." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang* 426-31.
- Yuni, Efa. 2017. "Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk." *Kelas. Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory & Application* 6(3):15-21.
- Yuyun Nuriyah Muslih, dkk. 2022. "Pemahaman Peran Kepala Sekolah Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Pada Mahapeserta didik Manajemen Pendidikan Islam Di Stai Nahdlatul Ulama Tasikmalaya." *AN-NAHDLIYYAH: JURNAL STUDI KEISLAMAN* 1(2):103-18.
- Zamroni, E.dan Raharjo S. 2015. "Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud No 111 Tahun 2014." *Jurnal Konseling Gusjigang* 1(1).